

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman kontemporer saat ini, sebuah percepatan teknologi dilakukan dengan mudah karena segala akses era modern ini dapat dilakukan melalui digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses konversi dari segala bentuk dokumen menjadi bentuk digital atau yang biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0. (Badurek, 2003). Dalam proses perkembangan digitalisasi banyak memanfaatkan teknologi beserta perangkat lunak sebagai alat penyimpanan data. Perubahan perilaku pada revolusi 4.0 menjadikan adanya transisi dari proses produksi tenaga kerja menjadi tenaga kerja dengan sistem mesin atau robot yang diprogram untuk menghasilkan produksi yang sifatnya otomatis.

Digitalisasi mencakup berbagai macam hal yang dapat berkesinambungan dengan isu sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dll. Terjadinya revolusi industri 4.0 ditandai dengan perubahan dan transisi dalam cara hidup, bekerja, dan hubungan antar manusia. Percepatan tersebut tentunya berpengaruh pada proses perumusan dan penetapan kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengatasi permasalahan internal maupun eksternal, dimana kebijakan dapat menentukan nasib negara kedepannya terhadap *outcome* dan kepentingan nasional negara tersebut. Melalui era digital negara dihadapkan dengan tantangan baru untuk segera menyesuaikan kebijakan negara dengan teknologi terbaru.

Dalam kemajuan Internet dan berbagai macam inovasi teknologi di berbagai sektor, membuat banyak masyarakat yang turut serta beralih ke dalam perbaruan tersebut untuk menikmati layanan dengan sistem yang efisien dan praktis. Pemanfaatan akses dokumen dapat dilakukan secara digital melalui informasi elektronik yang jauh lebih efisien, hal tersebut

dikarenakan informasi elektronik dapat diakses oleh banyak pengguna walau dalam waktu bersamaan dengan akses jarak jauh. Melalui gagasan Profesor Klaus Schwab yang memperkenalkan *The Fourth Revolution* (4 I R), ia mengungkapkan beberapa bidang yang akan mempengaruhi cara hidup manusia di masa depan, yaitu : (1) *Artificial Intelligence* dengan pembelajaran mendalam dan mesin (*deep learning and machine learning*), (2) Nanoteknologi, (3) Bioteknologi, (4) Komputasi kuantum, (5) *Blockchain* atau alat penyimpanan data digital, (6) *Internet of Things/ IoT*, (7) Cetak 3D, dll (Effoduh, 2016)

Negara Korea Selatan memanfaatkan ketersediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah memadai di negaranya sebagai alat dalam upaya diplomasi serta mewujudkan kepentingan nasionalnya, khususnya dalam pengembangan internet sebagai tonggak dalam kegiatan *Digital Diplomacy*. Diplomasi menurut buku *Internasional Relations* merupakan sebuah proses dialog antar aktor dalam suatu sistem internasional untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara damai untuk terlibat dengan publik (Mc GLINCHEY, 2017). Definisi dari diplomasi sendiri merupakan sebuah alat dalam pengelolaan hubungan internasional dengan komunikasi, negosiasi, maupun penawaran untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan yang diusulkan oleh aktor terkait (Viotti & Kauppi, 2013).

Di abad ke-21 ini seluruh kegiatan dilakukan dengan cara saling bekerja sama dengan meminimalisir konflik, begitu pula dengan diplomasi yang tidak hanya dijalankan oleh komponen negara, namun siapa saja dapat melakukan upaya diplomasi demi mengangkat citra negaranya. Hal tersebut termasuk dalam upaya *Soft Diplomacy & Public Diplomacy* yang mengedepankan hubungan negara dengan kerja sama serta penyelesaian upaya yang dilakukan secara damai, upaya *soft diplomacy & public diplomacy* biasanya berada dalam bidang persahabatan budaya, ekonomi, sosial, dll.

Diplomasi digital menurut (Robertson, 2018) merupakan kegiatan diplomasi yang berkaitan dengan penerapan teknologi digital seperti teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kegunaan rekayasa perangkat data besar dan kecerdasan buatan yang menyatu dengan sosial media yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan mempengaruhi aktor dalam proses diplomatik. Potensi diplomasi digital mengacu pada kemampuan kementerian luar negeri dalam : a.) Memanfaatkan sosial media untuk menjadikannya sebagai rutinitas kerja maupun kegiatan, b.) Menuai manfaat dari media sosial baik berupa informasi maupun data, c.) Mengatasi tantangan negara melalui aspirasi yang disampaikan pada internet (Manor, 2019).

Dunia saat ini sedang mengalami keterpurukan akibat wabah COVID-19 yang tak kunjung usai, dengan keterbatasan mobilitas maupun aktifitas diplomatik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah dan masyarakat tidak ingin kecolongan dalam berbagai sektor, maka dari itu pemerintah mengupayakan dengan kemajuan teknologi yang ada untuk dimanfaatkan secara efektif supaya mobilitas rakyat dapat berjalan kembali normal seperti pemanfaatan diplomasi digital. Budaya Korea Selatan yang serba *palli palli* (빨리 빨리) atau cepat cepat, dimana menjadikan mobilitas rakyat lebih efisien dan mudah diatur, karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan sekecil apapun.

Sebelumnya Korea Selatan menghadapi wabah MERS 2015, dimana pemerintah mengalami permasalahan sistem dalam penanganan penyakit menular. Menurut Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat/Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 5 aspek yang mempengaruhi pemerintah dalam mengambil tindakan penanggulangan, diantaranya (1) Struktur kelola penanganan wabah dipegang banyak pihak dan menimbulkan informasi yang rumpang dimana manajemen penyakit menular dan lembaga tanggap kritis diatur oleh *Korean Centers for Disease Control and Prevention*

(KCDC), sedangkan penilaian situasi kritis dipegang oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau *Ministry of health and welfare* (MOHW).

Selain itu terdapat lembaga lain yang turut menangani seperti *Central MERS Management Countermeasure*, *Pan-Government MERS Countermeasure Support*, dan satuan tugas respons antara pemerintah dan swasta yang dianggap menyulitkan tata kelola dan mempersulit pengambilan keputusan; (2) Kurangnya tenaga ahli dalam melakukan penelitian dalam menganalisis data penyakit sebagai epidemiolog; (3) Kurang meratanya lembaga yang merespons penyakit menular dan hanya berpusat di satu kota besar; (4) Kapasitas pelayanan kesehatan dan medis yang kurang memadai; (5) Meningkatnya jumlah pasien yang memerlukan penanganan di ruang gawat darurat (Adisasmito et al., 2021)

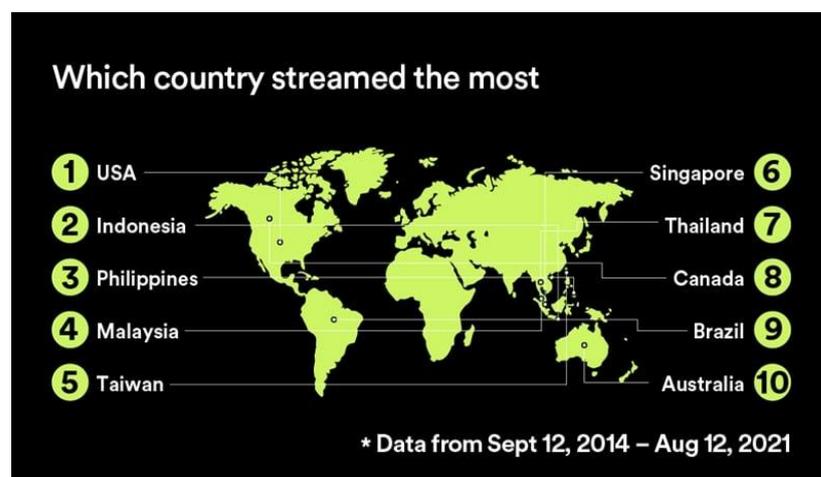
Di era teknologi digital, pemerintah Korea Selatan menaruh harapannya pada perkembangan IPTEK di negaranya dengan melakukan banyak investasi pada sektor terkait untuk mendukung kemajuan teknologi dalam persaingan percepatan transformasi dunia dalam Revolusi 4.0. Sebelumnya pengaruh Korea Selatan sudah masuk ke Indonesia dan merambah banyak sektor seperti industri hiburan, pariwisata, kuliner, alat elektronik, kecantikan, industri, infrastruktur, dll. Hal tersebut menandakan bahwa upaya diplomasi Korea Selatan berhasil dalam menasar pasar di Indonesia, kegiatan tersebut tidak luput dari besarnya pengaruh *Korean wave* di Indonesia yang sangat besar.

Secara tidak langsung para penggemar dunia hiburan Korea ikut serta dalam upaya diplomasi digital Korea Selatan dengan promosi melalui sosial media mereka. Terlebih di masa pandemi ini, dimana pemerintah mulai mengubah strategi dalam mendapatkan keuntungan negara melalui segala cara dengan teknik digital. Dengan keterbatasan aksesibilitas untuk beraktivitas diluar rumah, membuat masyarakat memilih untuk mencari hiburan yang datangnya dari internet, seperti meningkatnya demam drama

korea di Indonesia yang dapat diakses melalui jaringan TV kabel dan platform streaming film. Di dalam drama tersebut pemerintah Korea secara tidak langsung turut serta dalam kegiatan diplomasi digital dengan memasukkan beberapa adegan yang mengambil latar kebiasaan masyarakat Korea, baik dari segi budaya, kuliner, pola perilaku, maupun sinematografi yang apik.

Upaya tersebut tidak berhenti dengan hubungan satu arah, namun juga ada timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan melalui “*Korean Tourism Organization Indonesia*” yang mana bertujuan untuk meningkatkan *nation branding* “*Imagine your Korea*” dengan program wisata yang beragam dan menarik. Pemerintah juga menggandeng beberapa idol Kpop terkenal dalam melakukan promosi *nation branding* tersebut, yang pastinya akan menarik wisatawan lebih banyak. Seperti yang kita tahu jika penggemar Kpop di Indonesia jumlahnya terbilang banyak dan cukup loyal, menurut data dari aplikasi streaming musik online seperti *spotify*, Indonesia menempati urutan ke dua pendengar lagu Kpop terbanyak melalui daftar putar “*Kpop Daebak*” oleh *spotify*.

Gambar 1 : Negara dengan jumlah streaming daftar putar "Kpop Daebak" terbanyak di *spotify*



Sumber : Kpopmap.com (2021) <https://www.kpopmap.com/spotify-flagship-k-pop-playlist-k-pop-daebak-celebrates-its-7th-anniversary/>

Tidak berhenti disitu, diplomasi digital Korea Selatan diperkuat melalui meningkatnya Kpop di Indonesia dengan terus gencar dalam pelaksanaan kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan seperti dalam bidang bisnis dan pemasaran, produk dalam negeri seperti kosmetik dan kecantikan, *fashion*, infrastruktur, teknologi terbaru, otomotif, alat-alat medis, hingga obat-obatan herbal. Di Indonesia sendiri penggunaan kata “Korea” dalam hal pemasaran sudah menjadi kata kunci yang hangat dan mudah mendapatkan perhatian publik, banyak sekali produk dalam negeri yang mengambil kesempatan ini untuk membuat mode produksi dengan embel-embel Korea, yang mana akan menarik banyak konsumen.

Melalui penggunaan kata “Korea” pada produk komersil dalam pemasaran produk di *e-commerce* Indonesia, dengan mudahnya mendapatkan dan menarik konsumen untuk membeli barang tersebut. Dari situlah mulai meluasnya implementasi diplomasi digital, dimana upaya ini tidak hanya mengandalkan kebijakan atau kesepakatan yang dibuat oleh *G to G*, namun masyarakat umum serta publik dapat melakukan upaya tersebut dengan berbagai macam cara dengan adanya perkembangan IPTEK.

Diplomasi digital memiliki peranan yang penting dalam dunia internasional dan keberadaannya sangat krusial, seperti yang dibahas dalam buku *Digital Diplomacy : Theory and Practice*. Dimana diplomasi digital bergerak sebagai jembatan antara struktur lampau dan masa kini, sebagai jawaban pada perbedaan yang dihadapi melalui solusi perubahan yang baru (Bjola & Holmes, 2015). Inisiasi yang dilakukan kementerian luar negeri Swedia dengan menerapkan diplomasi digital adalah sebagai instrumen baru dalam transformasi digital untuk melakukan komunikasi, konektivitas, pembelajaran, pertukaran informasi, dalam skala budaya global untuk lebih responsif dalam menghadapi dan menjawab tantangan dunia global.

Proses perkembangan kementerian luar negeri Swedia berkembang pesat akibat adanya musibah tsunami Aceh 2004 yang menyebabkan 230.000

koban jiwa termasuk 550 warga Swedia. Dalam pemanfaatan diplomasi digital, Swedia menerapkan empat kategori fokus utama, yakni : *innovation, society, creativity and sustainability*. Tolak ukur Swedia dalam pembangunan sektor diplomasi digital adalah melalui kolaborasi dan pembelajaran, dengan menciptakan inisiasi maupun inovasi dalam berkomunikasi melalui jaringan masyarakat digital. Inovasi Swedia dalam ranah digital, yakni dengan adanya *Diplohack* sebagai alat dalam menghubungkan kedutaan besar untuk berkolaborasi dengan NGO, wirausahawan dan lainnya yang berhubungan dengan urusan diplomatik.

Perkembangan teknologi komunikasi dunia seiring perkembangan era digital banyak mengalami transformasi dimana individu, negara maupun kepentingan bisnis dapat berinteraksi tanpa batas dengan dunia global. Sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memiliki peran penting sebagai alat diplomatik suatu aktor pada sistem internasional yang dilakukan oleh individu, organisasi maupun pembuat kebijakan luar negeri dalam membentuk opini publik (Zaiotti & Bjola, 2020). Dalam praktik "*digital universe*" oleh organisasi internasional, keberadaan sosial media berfungsi sebagai cerminan struktur karakteristik organisasi internasional. Kerap kaitannya sosial media menjadi tren dalam personalisasi kegiatan politik dan diplomasi internasional untuk meraih intensi publik.

Tren dalam keberadaan sosial media sebagai alat diplomasi digital digunakan negara untuk melebarkan sayap dalam mendelegasikan *power* yang dimiliki negara tersebut, termasuk dalam prinsip pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, penetapan agenda, implementasi dan penegakan kebijakan baik dalam level internasional. Standar organisasi internasional menggunakan konten sosial media sebagai tindakan efektif dalam perlindungan hak dan proses demokrasi. Praktik digital di sosial media dapat merujuk pada postingan individual bahkan sampai pada kampanye media sosial untuk suatu kepentingan yang bergantung pada topik yang sedang hangat serta ketertarikan publik akan suatu konten.

Proses diplomasi publik dalam dunia kontemporer ini mengalami transformasi terutama dalam pelaksanaannya melalui media digital. Beberapa kementerian luar negeri menurut (Manor, 2019) adalah dilakukannya interaksi publik dengan memanfaatkan keterkaitan publik melalui konten online yang dapat diterima lingkungan masyarakat. Digitalisasi digunakan kementerian luar negeri untuk mengatur krisis hubungan publik di sosial media serta menjalin percakapan daring atas partisipasi publik dalam proses penentuan kebijakan luar negeri, sehingga adanya dialog atau komunikasi dua arah dimana kementerian luar negeri mengelola media sosial dalam memberikan perhatian khusus pada pengikut sosial media tersebut, seperti menjawab pertanyaan, merespon kritik, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi publik.

Seiring perkembangan zaman, teknologi digunakan sebagai alternatif dalam proses diplomasi. Hal ini mencakup dua alasan utama yaitu: Pertama, dengan pemanfaatan TIK, anggaran yang dikeluarkan negara dalam berdiplomasi terbilang efisien. Bentuk efisiensi yang dimaksud adalah dengan pemanfaatan sosial media seperti facebook yang dapat menghubungkan banyak pihak dengan konektivitas melalui tombol suka dan bagikan, sehingga lebih banyak sasaran yang dicakup. Kedua, platform digital menciptakan area kerja diplomatik yang lebih merata untuk meraih perhatian khalayak digital. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana platform digital dapat mencapai lapangan audiensi baru dengan pemanfaatan smartphone dan koneksi internet sebagai bentuk pekerjaan seperti jurnalis, pembuat pendapat, bloggers, perusahaan teknologi, dll. Manor berargumen bahwa adanya digitalisasi akan membawa proses jangka panjang yang berdampak pada norma, nilai, dan pernyataan para diplomat dan institusinya. Jumlah keterkaitan publik atau kepekaan pada media sosial kementerian luar negeri sangat berdampak pada proses diplomasi digital, kegiatan publik tersebut termasuk dalam membagikan postingan maupun menyukai dan mengomentari konten yang ditampilkan.

Dalam pelaksanaan diplomasi digital, ada beberapa hal utama yang ingin dicapai masing masing aktor terutama bagi kepentingan nasional. Melalui buku *Digital Diplomacy : Conversation on Innvation in Foreign Policy* yang berisi perbincangan dengan Macon Philips selaku koordinator informasi internasional Amerika Serikat, disebutkan ada tiga prioritas dalam pemanfaatan keberadaan media administrasi digital, yatu : (1) Komunikasi, sebagai sumber informasi yang meyakinkan publik jika pemerintahan turut hadir dalam perkembangan teknologi. Hal tersebut dilakukan melalui situs pemerintahan dimana White House dan presiden terlibat dalam keberadaan komunitas internet. (2) Transparansi, upaya ini mengalir sebagai komitmen presiden Barack Obama untuk mempermudah aksesibilitas publik terhadap kebijakan pemerintah maupun informasi yang mencakup info grafik, kepentingan komersil, serta video yang menjelaskan suatu isu. (3) Partisipasi, merupakan hal penting bagi masyarakat untuk bersuara serta kesigapan pemerintah untuk merespon dan saling terhubung. Upaya tersebut dilakukan dalam ‘We The People’ dengan penembangan sistem untuk melakukan komunikasi online dengan fokus pada publik (Sandre, 2015).

Teknologi mempengaruhi masyarakat termasuk cara pandang publik terhadap suatu kebijakan dan merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh masing-masing negara. Begitu pula dalam upaya persuasi pemerintahan, dimana perlunya kepercayaan publik terhadap pengaruh dari kebijakan yang ada sebab percakapan dua arah akan berdampak jika kedua pihak saling mengerti maksud dan tujuan yang disampaikan. Pemerintah bergerak untuk mendengarkan, merespon, dan meyakinkan nilai yang didapat. Pada dasarnya diplomasi digital harus mengalir melalui pendekatan yang mengakui keberadaan dan keterlibatan publik sebagai bagian dalam perumusan kebijakan, karena keterikatan publik dapat menjawab tujuan dari kebijakan luar negeri itu sendiri.

Dalam pandangan organisasi, teknologi digital dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu “*sustaining*” dan “*disruptive*” karena disatu sisi

teknologi dapat meningkatkan praktik untuk masa depan, namun di sisi lain dalam jangka pendek dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif yang sudah ada. Keberadaan diplomasi digital yang mengacu tentang penerapan teknologi digital, teknologi komunikasi dan informasi, rekayasa perangkat lunak, *Big Data* dan *Artificial Intelligence*, serta keberadaan dunia maya yang pemanfaatannya diatur oleh sebuah organisasi (Robertson, 2018). Pemanfaatan diplomasi digital oleh kementerian luar negeri dilakukan dengan memperhatikan sasaran, yaitu penilaian infrastruktur dan perangkat keras nasional, penilaian manajemen dan administrasi kementerian luar negeri, serta penilaian setiap individu terhadap kementerian luar negeri dalam pemanfaatan teknologi. Kegunaan big data serta artificial intelligence di Korea Selatan saat ini menjadi topik hangat, bahkan teknologi hologram dihadirkan dalam acara suatu organisasi sebagai wujud kehadiran seseorang.

Untuk menghadapi pandemi global dalam era digital dilakukan dengan mempercepat pengawasan internasional terhadap penggunaan teknologi dalam keamanan publik sebagai kontrol sosial untuk mengalihkan kekuasaan dari individu ke negara (Part et al., 2020) dengan judul "*Security, technology and diplomacy : Covid-19 will accelerate the surveillance state*". Investasi yang dilakukan pemerintah mencakup modal dalam pengawasan teknologi baru dan yang sedang berkembang dengan memproses data massal melalui lokasi, aktivitas (fisik dan digital) dan biometrik (DNA dan genomik). Data tersebut berasal dari sensor *Internet of Things (IoT)* seperti kamera cctv, perangkat medis, aplikasi seluler, media sosial, serta penggunaan data internet pribadi.

Kegunaan perangkat teknologi tersebut sangat memudahkan identifikasi algoritma informasi serta memajukan *machine learning* dalam penggunaan *Big Data* yang dapat menghasilkan analisis dan prediksi yang akurat terlebih bagi aplikasi kesehatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam demokrasi digital serta partisipasi masyarakat untuk meminimalisir penyebaran pandemi menjadi elemen yang sangat membantu pemerintah

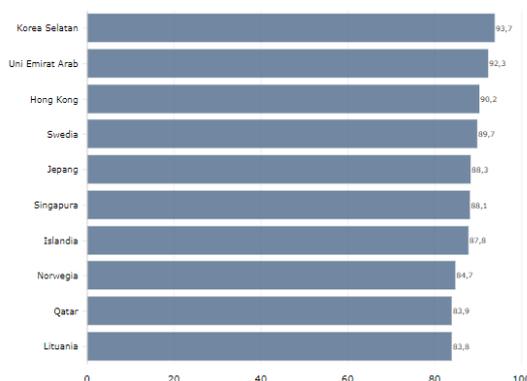
dalam pengelolaan data untuk pengambilan keputusan dalam keterbatasan pandemi. Melalui pergeseran kegiatan global akibat pandemi, eksplorasi kegunaan *big data* bertujuan untuk mengurangi masalah kesehatan, seperti dengan pemilihan jalur pengobatan dan sistem perawatan kesehatan. Pengembangan aplikasi *big data* sangat membantu negara pemangku kepentingan sebagai layanan kesehatan, karena dapat memotong batasan antar pengelola dan dapat terintegrasi secara efektif dengan tetap melindungi privasi dan keamanan, serta *big data* memainkan peran utama dalam pembangunan infrastruktur (Jee & Kim, 2013).

Karena adanya dinamika baru dan perubahan penerapan kebijakan maka diplomasi digital memiliki peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri melalui empat bidang, yaitu penyampaian layanan, ide, jaringan, dan informasi (Westcott, 2011) "*Digital Diplomacy : The Impact of the Internet on International Relations*". (1) Penyampaian layanan yang dimaksud adalah hubungan antara diplomat dan kementerian luar negeri dalam menyediakan sarana layanan komunikasi yang universal dan instan yang bersifat *online*, seperti pelayanan perdagangan, investasi, pembuatan paspor dan visa, dll. (2) Ide, merupakan hal penting dalam memahami situasi dunia sebagaimana media atau teknologi dapat digunakan untuk alat pertukaran ide yang nantinya dapat mempengaruhi opini publik dunia melalui ruang virtual; (3) Jaringan, diciptakan untuk memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri dalam pengambilan keputusan yang mana sebelumnya pemangku kepentingan akan membentuk opini untuk memulai perdebatan kebijakan internal; (4) Informasi, berperan sebagai proses analisis yang lebih luas yang akan dibagikan pada aktor yang terlibat untuk meningkatkan argumentasi dalam penentuan keputusan kebijakan yang dilihat dari berbagai macam aspek. Kegunaan internet dalam perubahan bidang diplomatik menjadi diplomasi digital dimaksudkan untuk penyatuan seluruh informasi yang diandalkan dan akan dikumpulkan untuk memenuhi prasyarat dalam pengambilan keputusan dan negosiasi.

Korea Selatan sebagai negara maju yang didukung dengan segala teknologi modern menggunakan pendekatan *Smart City* untuk menggali lebih dalam tentang infrastruktur kota yang canggih sebagai potensi promosi negara yang tentunya menggunakan instrumen teknologi dan internet sebagai tonggak perjalanan *smart city* untuk berdiplomasi dalam konteks pandemi COVID-19 (Gibson, 2021). Sumber daya dan infrastruktur *smart city* menjadi instrumen yang penting dalam manajemen penanganan pandemi karena efektifitas ICT (*Internet Communication Technologies*) dan *Internet of Things* yang berasal dari teknologi pintar yang membantu menyeimbangkan citra nasional.

Presiden Moon Jae-in menggarisbawahi jika *smart city* menjadi salah satu prioritas tertinggi pemerintahan karena Korea Selatan menjadi pionir pertama sebagai negara yang mengadopsi hukum yang berkaitan dengan kota pintar sebagai keberlanjutan kota dengan menumbuhkan industri baru dengan pemanfaatan inovasi teknologi di era revolusi industri 4.0. Sebagai respons dari *smart city*, Korea Selatan menaruh harapan terhadap perkembangan infrastruktur ICT, *Big Data and Artificial Intelligence* yang luas dan penting dalam manajemen, analisis, dan penggunaan informasi terkait COVID-19. Pengendalian pandemi yang dilakukan Korea Selatan memberikan kesempatan pada masyarakat internasional untuk memanfaatkan teknologi pintar dengan manajemen pemerintah pusat dengan mitra lokal, perusahaan, maupun masyarakat sekalian sebagai manajemen krisis yang efektif dan transparan. Sebagai penerapan *smart city*, Korea Selatan telah bersiap terhadap skenario terburuk apabila keadaan post-pandemi semakin tidak terprediksi. *Smart city* digunakan Korea Selatan sebagai citra negara untuk mendapatkan lingkungan strategis dalam upaya diplomasi digital yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional melalui IPTEK.

Gambar 2 Negara pengadopsi TIK terbesar



Sumber : World Economic Forum, 16 Desember 2020 (*Korea , a World Leading ICT Powerhouse, n.d.*)

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi komponen penting dari sistem ekonomi, dimulai dari proses pengembangan baik teknik manajemen, pengelolaan, dan komunikasi informasi digital (Chadwick, 2005). Pandangan tentang bagaimana revolusi digital yang berjalan di *Republic of Korea* atau Korea Selatan pada masa krisis moneter Asia di tahun 1990-2000 sangat mempengaruhi pengelolaan IPTEK, karena pada masa itu pemerintah langsung menaruh fokus dan investasi pada pembangunan infrastruktur dan industri untuk mendongkrak kembali perekonomian negara.

Terdapat pengaruh ICT pada ekonomi nasional Korea Selatan, dan perubahan tersebut telah menciptakan revolusi digital seperti, (1) Industri baru di sektor ekonomi: industri perangkat lunak; ponsel; komputer dan periferal. (2) Cara baru dalam kegiatan bisnis: *e-commerce* atau platform digital yang menyediakan kegiatan transaksi; kegiatan organisasi yang terdistribusi secara global; pasokan rantai yang terintegrasi. (3) Pembelajaran baru dalam pembangunan ekonomi dan politik : ketersediaan akses informasi; literasi komputer; dan kesenjangan digital. Berkat revolusi digital, GDP nasional Korea Selatan mengalami peningkatan, yang mana Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi efisiensi dan produktivitas negara dalam kegiatan ekonomi, serta menyediakan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan agar tidak ada penyimpangan dari tujuan awal serta menghindari meluasnya pembahasan dari pokok permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu **Bagaimana diplomasi digital Korea Selatan terhadap Indonesia pada masa pandemi COVID-19?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi diplomasi digital serta menggali kegiatan di era digital oleh Korea Selatan dalam menghadapi COVID-19 sebagai peningkatan daya tahan perekonomian negara.

2. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut kegiatan diplomasi publik Korea Selatan melalui kegiatan digital dan juga sebagai bahan dalam memperkaya literatur penelitian di masa mendatang.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan seluruh elemen baik pembaca dan penulis mendapatkan manfaat dalam bidang akademis dan praktis.

1. Dalam bidang akademis diharapkan akan menjadi wajah baru dalam perubahan studi Hubungan Internasional dengan keterlibatan aktor yang semakin banyak.
2. Dalam manfaat praktis akan menjadi pemahaman baru dalam penggunaan teknologi, dimana digitalisasi menjadi alat dan kompleksitas dari model diplomat dalam meningkatkan perubahan sistem internasional.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar belakang penelitian dan kajian pustaka terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan Tinjauan Pustaka untuk menemukan celah mendalam pada penelitian yang akan dilakukan. Teori dan Konsep penelitian sebagai alat dalam menentukan dan mengembangkan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori *foreign economic policy* dan konsep yang digunakan adalah diplomasi digital yang merupakan turunan dari diplomasi publik. Serta tercakup kerangka pemikiran yang membantu dalam alur berpikir untuk menemukan jawaban penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian pada negara Korea Selatan. Oleh karena itu jenis penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dokumen, dan audiovisual. Untuk sumber data, peneliti menggunakan data sekunder dengan pengamatan melalui internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Serta tabel rencana waktu yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA PERANNYA DALAM PELAKSANAAN *FOREIGN ECONOMIC POLICY* KOREA SELATAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan IPTEK melalui kebiasaan perilaku dan budaya masyarakat Korea Selatan yang melakukan aktivitas bergerak cepat-cepat (*palli-palli*). Kebiasaan tersebut mengacu pada penentuan kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai strategi pembangunan ekonomi dengan implementasi kebijakan *New Southern Policy* dan *Special Strategic Partnership* dengan Indonesia.

BAB V : DIPLOMASI DIGITAL KOREA SELATAN TERHADAP INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bab ini penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Dimulai dengan penjelasan diplomasi digital serta kegunaan IPTEK, kemudian kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia yang dilanjutkan pada pemanfaatan era digital sebagai alternatif dalam situasi pandemi COVID-19.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan poin utama dari keseluruhan analisa penelitian serta saran terhadap masalah terkait yang ditunjukkan pada instansi terkait.